

## ***Collaborative Governance Dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Melalui Festival Langkisau Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat***

**M Haasyir Almaahi<sup>1</sup>; Rita Myrna<sup>2</sup>; Nina Karlina<sup>3</sup>**

*Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences*

<sup>1</sup>muhammad17183@Mail.Unpad.Ac.Id; <sup>2</sup>myrna@Unpad.Ac.Id; <sup>3</sup>ninakarlina71@Gmail.Com

### **ABSTRAK**

KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG TERLETAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT MEMILIKI KEBUDAYAAN YANG SANGAT BERAGAM SERTA MASIH DIJAGA OLEH MASYARAKATNYA HINGGA SAAT INI. KARENA KEBERAGAMAN BUDAYA INILAH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SELALU BERUSAHA UNTUK MELESTARIKANNYA, MAKA DARI ITU LAHIRLAH SEBUAH KEGIATAN FESTIVAL YANG DINAMAKAN FESTIVAL LANGKISAU, KEGIATAN INI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK UPAYA PEMERINTAH DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN YANG ADA AGAR TIDAK HILANG SEIRING KEMAJUAN ZAMAN.

TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PENERAPAN PRINSIP COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA DAERAH MELALUI KEGIATAN FESTIVAL LANGKISAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT. DASAR TEORI YANG DIGUNAKAN PADA PENELITIAN INI MENGGUNAKAN TEORI LIMA PRINSIP PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE OLEH ROSYIDA TAHUN 2017. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN METODE KUALITATIF. TEKNIK PENGUMPULAN DATA YANG DIGUNAKAN OLEH PENELITI ADALAH OBSERVASI, WAWANCARA DAN DOKUMENTASI. SELANJUTNYA TEKNIK PENGOLAHAN DATA YANG DIGUNAKAN PENELITI ADALAH REDUKSI DATA, PENYAJIAN DATA DAN PENARIKAN KESIMPULAN. HASIL DARI PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA PENERAPAN PRINSIP COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT SUDAH TERLAKSANA, HANYA SAJA MASIH TERDAPAT SATU KELEMAHAN YAITU BELUM ADANYA MOU YANG MENGIKAT HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA ACTOR YANG TERLIBAT.

**KATA KUNCI:** COLLABORATIVE GOVERNANCE, PELESTARIAN, KEBUDAYAAN

### **COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EFFORT PRESERVATION OF REGIONAL CULTURE THROUGH FESTIVAL LANGKISAU IN PESISIR SELATAN DISTRICT, WEST SUMATRA**

### **ABSTRACT**

*PESISIR SELATAN REGENCY, WHICH IS LOCATED IN WEST SUMATRA PROVINCE, HAS A VERY DIVERSE CULTURE AND IS STILL MAINTAINED BY ITS PEOPLE TODAY. BECAUSE OF THIS CULTURAL DIVERSITY, THE PESISIR SELATAN REGENCY GOVERNMENT ALWAYS TRIES TO PRESERVE IT, THEREFORE A FESTIVAL ACTIVITY CALLED THE LANGKISAU FESTIVAL WAS BORN, THIS ACTIVITY IS ONE OF THE GOVERNMENT'S EFFORTS TO PRESERVE THE EXISTING CULTURE SO THAT IT DOES NOT DISAPPEAR WITH THE PROGRESS OF THE TIMES.*

*THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO FIND OUT HOW THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN REGIONAL CULTURAL PRESERVATION EFFORTS THROUGH THE LANGKISAU FESTIVAL IN PESISIR SELATAN REGENCY, WEST SUMATRA PROVINCE. THE THEORETICAL BASIS USED IN THIS STUDY USES THE THEORY OF THE FIVE PRINCIPLES OF THE APPLICATION OF COLLABORATIVE GOVERNANCE BY ROSYIDA IN 2017. THIS STUDY USES A QUALITATIVE METHOD. DATA COLLECTION TECHNIQUES USED BY RESEARCHERS ARE OBSERVATION, INTERVIEWS AND DOCUMENTATION. FURTHERMORE, THE DATA PROCESSING TECHNIQUE USED BY THE RESEARCHER IS DATA REDUCTION, DATA PRESENTATION AND CONCLUSION DRAWING. THE RESULTS OF THIS STUDY INDICATE THAT THE APPLICATION OF COLLABORATIVE GOVERNANCE PRINCIPLES IN AN EFFORT TO PRESERVE REGIONAL CULTURE IN PESISIR SELATAN REGENCY, WEST SUMATRA PROVINCE HAS BEEN DONE, BUT THERE IS STILL ONE WEAKNESS, NAMELY THE ABSENCE OF AN MOU THAT BINDS THE COOPERATIVE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACTORS INVOLVED.*

**KEYWORDS:** COLLABORATIVE GOVERNANCE, PRESERVATION, CULTURE

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Akibat dari kebudayaan yang beragam inilah membuat masing – masing daerah di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas mereka masing – masing. Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan memiliki kekayaan budaya daerah, yang berada dan tersebar di tiap daerahnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peninggalan bukti – bukti sejarah yang masih ada sampai sekarang seperti rumah adat, kesenian, dan unsur – unsur kebudayaan lainnya yang masih kental di beberapa tempat.

Munculnya budaya – budaya yang khas dan beragam dari tiap daerah seperti yang kita lihat pada saat ini, tidak terlepas dari proses interaksi antara berbagai macam corak kebudayaan yang terjadi selama berabad – abad. Secara defenitif menurut Geertz dalam Tuloli et.al (2003:2). Kebudayaan yang muncul dengan berbagai ciri khas yang beragam di setiap daerah di seluruh Indonesia tidak lain adalah hasil warisan dari proses interaksi manusia yang sudah ada sejak berabad – abad lalu (Tuloli, 2003).

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan - kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Dimana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya (Yoeti, 2005).

Kebudayaan sendiri dikategorikan menjadi kebudayaan benda dan kebudayaan tak benda. Kebudayaan benda merupakan warisan budaya yang dapat dilihat sebagai benda, bangunan, struktur buatan, manusia ataupun alamiah yang dapat memberikan nilai budaya bagai pemakainya. Seperti candi, dan lain - lain. Warisan budaya tak benda sendiri merupakan segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan dan ruang budaya terkait yang diakui oleh berbagai

komunitas, kelompok dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian dari warisan budaya mereka (Gerakan Literasi Nasional).

Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri telah ada yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, diantaranya; Tari Sikambang Manih, Tari Kain dan Babiola, yang termasuk kedalam jenis seni pertunjukan. Ada juga Anak Balam dan Badampiang, yang termasuk ke dalam jenis tradisi dan ekspresi lisan, serta Patang Balimau yang termasuk kedalam adat istiadat masyarakat pada saat perayaan tertentu. Tak sampai disitu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bertekad dan akan terus berupaya melestarikan karya budaya melalui berbagai kegiatan salah satunya memasukkannya kedalam kurikulum Pendidikan (Antarnews.com, 2019)

Kebudayaan merupakan salah satu identitas yang dimiliki dan harus dijaga agar tidak hilang di telan waktu. Identitas yang dimiliki merupakan kode yang mendefinisikan keanggotaan dalam komunitas yang beragam (Littlejhon, 2009:13). Dan Kabupaten Pesisir Selatan sendiri memiliki potensi kekayaan alam serta seni dan kebudayaan yang juga menjadi nilai jual bagi Kabupaten ini, dan dikenal juga dengan sebutan “Pesisir Selatan Negeri Sejuta Pesona” maka dari itu kekayaan yang dimiliki ini hendaknya harus selalu dijaga, agar tidak menghilang.

Mengacu pada PERDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Pasal 2 Ayat ke 7 Tahun 2015, sasaran pembangunan pariwisata meliputi; (a) meningkatnya apresiasi terhadap kebudayaan daerah, (b) meningkatkan rasa cinta dan memiliki tanah air, (c) meningkatnya potensi seni dan lestari nilai sejarah dan budaya. Untuk urusan kebudayaan berdasarkan RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beberapa tujuan untuk mewujudkan sikap mental masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan social masyarakat sesuai dengan nilai – nilai agama, adat budaya, dan kearifan lokal, dengan sasaran; (a) terwujudnya pelaksanaan revolusi mental sesuai dengan nilai – nilai agama, adat budaya dan kearifan lokal, (b) terwujudnya penguatan kelembagaan agama adat dan budaya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga

memiliki kebijakan umum dalam pembangunan daerah pada sektor kebudayaan, diantaranya: (a) meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pemangku adat dan agama (b) meningkatnya fungsi dan peranan lembaga adat dan agama serta (c) terlaksananya pelestarian nilai – nilai seni dan budaya. Hal ini membuktikan bahwa penguatan dan pelestarian nilai budaya juga menjadi fokus dan cita – cita pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembangunan daerahnya.

UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan nampaknya membawa udara segar dalam pembangunan kebudayaan. Menurut UU tersebut, pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional (Citra Hennida, 2017) (Zuriatina, 2020).

Pada pelaksanaan otonomi daerah, masing – masing daerah memiliki otoritas yang luas untuk melestarikan dan mengembangkan berbagai macam potensi daerah yang dimiliki termasuk kebudayaan. Begitu juga pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki budaya beragam, memilih untuk mengadakan acara Festival Langkisau, sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki.

Festival langkisau sendiri muncul karena Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki event tahunan yang berskala besar yang mampu merepresentasikan kebudayaan serta pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ke dunia luar, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkeinginan bagaimana supaya daerahnya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar daerah baik itu budaya maupun pariwisatanya. Dari sini muncullah gagasan dari pemerintah sebuah event yang bernama Festival Langkisau. Karena pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan sebuah event yang dapat menampilkan seluruh kebudayaan daerahnya. Sebagai pembeda kegiatan ini dengan kegiatan yang diadakan pemerintah

lainnya, disini pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, dengan tujuan agar kegiatan ini berjalan dengan lebih meriah dan menjadi daya tarik yang menjanjikan bagi pengunjung. serta masyarakat dapat menyadari kekayaan budaya yang mereka miliki. Disamping untuk memperingati hari jadi Kabupaten Pesisir Selatan, Kegiatan Festival ini juga menjadi sebuah event yang membuat Kabupaten Pesisir Selatan dikenal oleh wisatawan, khususnya yang berasal dari luar daerah.

Festival Langkisau namaya dahulu adalah Event Paralayang, kemudian diganti agar namanya menjadi lebih bumi, yaitu sesuai dengan bukit yang terkenal di daerah Pesisir Selatan, Bukit Langkisau. Festival Langkisau sendiri merupakan karnaval tahunan yang berkonsep representasi dan menampilkan budaya khas dan objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan dan bertujuan untuk melestarikan nilai – nilai budaya anak nagari dan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Yang berlokasi di salah satu objek wisata kenamaan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Pantai Carocok Painan. Pesisir Selatan sendiri merupakan daerah yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan ciri khas yang unik. Karena kekayaan khasanah seni budaya yang dimiliki, Festival Langkisau diharapkan mampu untuk mempertahankan kebudayaan nagari yang selama ini tumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat. Perayaan ini dikemas dalam bentuk perayaan berskala besar diisi dengan perlombaan tradisional dengan mempertahankan nilai – nilai budaya yang sudah tumbuh, berkembang, dalam lingkungan masyarakat baik spirit maupun filosofinya. Kegiatan Festival Langkisau telah menjadi agenda rutin Pesisir Selatan yang diadakan guna mempromosikan potensi wisata dan pelestarian budaya Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat agar semakin dikenal oleh masyarakat lokal maupun mancanegara (Festival Langkisau ajang promosi, 2020)

Terlaksananya Festival Langkisau, tidak terlepas dari usaha pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang selalu berusaha agar nilai kebudayaan anak nagari dapat selalu dilestarikan. Kegiatan ini memiliki rangkaian acara dan diisi dengan perlombaan yang bernuansakan kebudayaan setempat. Tahun 2020 Dinas Pariwisata Sumatera Barat mendukung acara ini dan

Festival Langkisau masuk kalender wisata Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan pejabat Dinas Pariwisata Sumbar (Festival Langkisau Masuk Kalender Pariwisata Sumbar, 2020)

Festival Langkisau dilaksanakan pada bulan April tiap tahunnya. Rangkaian acara yang digelar yakni, Pemilihan Uda Uni Pesisir Selatan, Pameran Budaya, Kerajinan Masyarakat, Permainan Tradisional, Lomba Mangaik Mungkuih, Lukah Gilo, Lomba Rias Anak Daro dan Festival Mancakau Lamang Angek. Ada juga stand – stand untuk pameran budaya yang nantinya akan diisi oleh masyarakat. Kegiatan ini digelar di beberapa Kawasan Pesisir Selatan diantaranya di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan IV Jurai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan potensi wisata, budaya dan kuliner yang ada di daerah tersebut. Dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk menjalankan dan berpartisipasi sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing – masing maka kegiatan ini diharapkan akan terlaksana dengan persiapan yang lebih baik dengan kemeriahan yang lebih menggelora (Festival Langkisau Akan Isi Kemeriahan Hari Jadi Kabupaten Pessel, 2018)

Untuk terlaksananya program ini, pemerintah Kabupaten pesisir selatan pastinya sangat membutuhkan kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dan juga masyarakat, mengingat pemerintah juga mempunyai batas kemampuan. Terutama dalam hal sumber daya manusia. Pihak pemerintah sendiri tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menangani kegiatan ini secara mandiri. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selaku penanggung jawab, juga melibatkan actor non-pemerintah dalam pelaksanaan Festival Langkisau. Pihak yang terlibat antara lain, pihak swasta, dan juga masyarakat umum, yang nantinya dengan dilibatkannya masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai budayanya . Masing – masing stakeholder tersebut membangun relasi antar aktor sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pemerintah Pesisir Selatan selaku pelaku utama pelaksanaan program pengenalan budaya ini menjadi penanggung jawab dalam setiap

penyelenggaraan kegiatan (Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pelaksanaan dan Keikutsertaan Event Budaya dan Kepariwisata Pesisir Selatan)

Konsep yang dibangun dalam kegiatan Festival Langkisau adalah perayaan dan perlombaan tradisional anak nagari serta pameran kebudayaan local dan juga promosi potensi wisata, maka dalam proses pelaksanaannya sangat membutuhkan peran sumber daya non-pemerintah agar perayaan ini berjalan sesuai dengan tujuan (berita.pesisirselatankab.go.id). Beberapa stakeholder non- pemerintah yang dilibatkan dalam kegiatan Festival Langkisau adalah Sanggar Seni Nan Gombang dan tentunya juga masyarakat Pesisir Selatan. Pada pelaksanaan kegiatan Festival Langkisau, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kabupaten Pesisir Selatan memberikan peran kepada masing – masing stakeholder untuk menjalankan fungsi kerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Sanggar Seni Nan Gombang sendiri merupakan salah satu sanggar seni yang tertua ternama dan masih aktif dalam melakukan kegiatannya sampai hari ini. Sanggar ini didirikan pada tahun 1988 di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan sanggar seni ini didirikan adalah membantu pemerintah untuk menunjang pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Dalam perjalanannya hingga saat ini Sanggar Seni Nan Gombang sudah banyak menorehkan prestasi di berbagai pentas seni seperti tari, lagu, teater dan puisi, baik ditingkat provinsi, Nasional, Maupun Internasional (Dokumen Profil Sanggar Seni Nan Gombang).

Motif keikutsertaan Sanggar Seni Nan Gombang dalam kegiatan Festival Langkisau adalah untuk menunjang pelestarian budaya dan pengembangan Pariwisata, sangat dibutuhkan Sanggar-Sanggar Seni untuk mengemas dan menampilkan paket-paket seni baik seni Tradisional maupun moderen. Atas dasar tersebut dan ingin berperan aktif dalam membantu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melestarikan budaya, maka dari itu Sanggar Seni Nan Gombang di dirikan (Profil Sanggar Seni Nan Gombang).

Keikutsertaan Sanggar Seni Nan Gombang dalam acara Festival Langkisau disebabkan karena track record yang dimiliki oleh sanggar seni ini sangat luar biasa. Berdasarkan pertimbangan ini, dan juga visi

dan misi yang sesuai, maka tidak heran pemerintah berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan Festival Langkisau dengan Sanggar Seni Nan Gombang (Dokumen Profil Sanggar Seni Nan Gombang).

### Tinjauan mengenai Collaborative Governance

Menurut pendapat Ansell dan Gash "Collaborative Governance is A Governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public" (Ansell and Gash, 2008:544). Collaborative governance dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance. Konsep ini menegaskan akan pentingnya suatu keadaan dimana aktor public atau aktor privat bekerja sama melalui cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan dan kebijakan yang tepat untuk public atau masyarakat. Konsep ini menggambarkan bahwa dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor public yaitu pemerintah dan aktor privat disini ada organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah sesuatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri – sendiri melainkan bekerja secara berbarengan demi kepentingan masyarakat.

Collaborative governance merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi-stakeholder dalam urusan – urusan publik. Ada karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi. Kolaborasi dimaknai berbeda dengan jaringan (Network) dan kemitraan (partnership). Menurut Ansell dan Gash (2007:547-548), jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat yang lingkungannya lebih plural, informal dan implisit. Kemitraan digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang lebih berorientasi pada koordinasi daripada consensus dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi melibatkan pengelolaan hubungan untuk memanipulasi regulasi dan sistem, sementara jaringan hanya berbicara pada pelaksanaan pekerjaan sipil (Goliday, 2010). Kemitraan

terjadi ketika agen privat kurang lebih menggantikan peran public, sedangkan kolaborasi terjadi ketika agen public dan private melakukan fungsi – fungsi aktif (Bevir, 2009).

### Prinsip Collaborative Governance

Kolaborasi berarti keterlibatan semua pihak dalam upaya yang terkoordinasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam memecahkan suatu masalah interaksi kolaboratif yang dicirikan oleh tujuan bersama sangat diperlukan. Kolaborasi juga sangat bermanfaat untuk mendorong proses membuat pilihan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan.

Menurut Rosyida, Dkk (2017) ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam kegiatan kolaborasi, diantaranya :

1. **Partisipasi (Participation)**, berkaitan dengan suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atasnya.
2. **Akseptasi (Acceptable)**, berkaitan dengan penjaminan atau tanda bukti ketika melakukan kerjasama.
3. **Komunikasi (Communication)**, kualitas komunikasi pemerintah sangat penting bagi masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus terlibat langsung dalam proses pertukaran informasi mengenai suatu kebijakan, idea atau gagasan serta keputusan antara pemerintah serta pihak yang bersangkutan
4. **Percaya (Trust)**, terbentuknya kepercayaan antar pihak tidak terlepas dari komunikasi yang intens antar pihak yang terlibat dalam proses kerjasama.
5. **Berbagi (Share)**, berkaitan dengan sikap saling memahami dalam melaksanakan suatu kegiatan dan kerjasama agar tujuan bersama dapat tercapai.

Kolaborasi merupakan kerjasama yang membutuhkan bantuan dari pihak lain, menurut Raharja (2008:8) hakikat kolaborasi adalah suatu kerjasama yang di adakan antar organisasi untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai apabila dilakukan secara mandiri.

### Konsep pelestarian budaya

Menurut A.W Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan

tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, dan luwes (Jacobus, 2006:115). Pelestarian merupakan sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing (Alwasilah, 2006: 18).

Berbicara mengenai pelestarian budaya daerah, Jacobus Ranjabar (2006:114) berpendapat bahwa pelestarian budaya daerah merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan nilai – nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah untuk menjalankan revitalisasi budaya (penguatan). Berbicara tentang revitalisasi budaya, Prof. A. Chaedar Alwasilah berpendapat bahwa ada tiga langkah yaitu: (1) pemahan untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, (3) dan pembangkita kreativitas budaya. Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini sering juga disebut sebagai faktor yang mendukung baik itu dari dalam maupun dari luar hal yang dilestarikan. Dengan demikian, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenai strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masing – masing (Chaedar, 2006:18).

Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan pencerminan dinamika (Soekanto, 2003: 432). Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang (Prof. Dr. I Gede Pitana, Bali Post, 2003).

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pelestarian merupakan suatu upaya yang mempunyai proses dan memiliki cara untuk menjaga, melindungi, dan

juga dapat mengembangkan sesuatu yang berbenda atau tak benda agar tetap bertahan dan tidak punah. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian budaya daerah adalah suatu usaha atau upaya untuk mempertahankan budaya supaya tetap sebagaimana adanya.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai penerapan prinsip Collaborative Governance dalam upaya pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena tujuan yang demikian maka pada penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain deskriptif. Peneliti diharapkan mampu untuk mengetahui lebih dalam mengenai penerapan prinsip Collaborative Governance dalam upaya pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan secara mendalam dan menyeluruh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data display, dan verification sedangkan teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan prinsip collaborative governance dalam upaya pelestarian budaya daerah melalui Festival Langkisau di kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

Implementasi dari Collaborative Governance adalah keterlibatan stakeholders mana saja yang tengah memulai kerjasama dari masing – masing stakeholders terkait untuk memutuskan atau mendefinisikan suatu tujuan, menilai hasil yang mungkin dapat menyebabkan perubahan dan sebagainya. Prinsip pelaksanaan Collaborative Governance merupakan suatu cara untuk merespon keinginan pemangku kepentingan yang terlibat pada suatu kerjasama yang bertujuan agar hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh para pemangku kepentingan.

Focus peneliti yang dijadikan sebagai acuan dalam indicator – indicator prinsip pelaksanaan Collaborative Governance adalah

: (1) Partisipasi, (2) Akseptasi, (3) Komunikasi, (4) Percaya, (5) Berbagi.

### **1. Partisipasi pemerintah serta institusi non-pemerintah terhadap pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan**

Jadi salah satu usaha dalam pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tentunya sangat membutuhkan partisipasi dari pemerintah, maupun diluar pemerintah dan juga masyarakat. Kebudayaan daerah sudah semestinya harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya tradisional, mengingat pada saat ini maraknya pengaruh budaya modern dari luar. Budaya tradisional hendaknya harus selalu tetap melekat pada kehidupan masyarakat, melekat dalam system tatanan nilai norma tradisi suatu budaya local turun temurun.

Partisipasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap usaha pelestarian budaya daerah sangat luar biasa, karena pemerintah sendiri berperan sebagai jembatan terlaksananya usaha pelestarian budaya di Kabupaten ini. Dari pihak pemerintah sendiri salah satu bentuk partisipasinya terhadap pelestarian budaya adalah dengan memberikan bantuan terhadap sanggar – sanggar yang terdaftar baik itu moril maupun materil, melakukan penyuluhan kebudayaan, pelatihan dan workshop kepada pelaku seni, baik dari generasi muda sampai ke generasi tua. Pemerintah disini juga berperan sebagai wadah penampung kreatifitas dari pelaku seni dan budaya. Sampai ke mengadakan kegiatan kebudayaan tahunan yaitu Festival Langkisau.

Sedangkan bentuk partisipasi dari institusi non pemerintah, dalam hal ini diwakilkan oleh Sanggar Seni Nan Gombang adalah, pihak sanggar selalu berusaha mengembangkan kesenian daerah, terutama dibidang music dan tari, Sanggar ini sering membuat gerakan dan music yang cikal bakalnya dari kesenian daerah untuk dijadikan sebagai gerakan atau instrumen dasar yang nantinya dikembangkan oleh pihak sanggar ini, yang nantinya akan menjadi sebuah tarian atau instrument music baru. Hingga pada akhirnya nanti ditampilkan pada Festival kebudayaan baik ditingkat local, nasional maupun internasional.

Pentingnya partisipasi dari segala pihak sangat dibutuhkan dalam upaya pelestarian budaya daerah ini, agar dapat

menumbuhkan sikap kritis dan sadar terhadap nilai – nilai suatu budaya, serta memperkuat ketahanan

budaya. Suatu kebudayaan akan terus ada jika setiap individu menjaganya serta saling ikut dalam mengembangkan kearifan local.

### **2. Akseptasi (system kerjasama pemerintah dengan sanggar nan gombang terkait pada kegiatan Festival Langkisau)**

Akseptasi dalam kerjasama yaitu proses dari suatu penjaminan, bisa juga disebut sebagai MoU atau tanda bukti ketika melakukan sebuah kerjasama yang baik antara pemerintah-swasta agar tidak ada yang merasa dominan dalam kerjasama tersebut.

Pada pelaksanaan Festival Langkisau, pemerintah sendiri terkait system kerjasamanya atau perjanjian kerjasama dengan sanggar nan gombang, belum memiliki system kerjasama yang terstruktur atau perjanjian tertulis yang diatur dalam suatu peraturan pada pelaksanaan Festival Langkisau. Akan tetapi setiap ada acara atau kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan kebudayaan, termasuk Festival Langkisau pasti pihak pemerintah selalu mengundang atau mengikutsertakan sanggar – sanggar yang ada di Kabupaten ini, begitu juga sebaliknya pemerintah akan siap memberikan respon yang baik kepada pihak yang membutuhkan terutama sanggar, kapanpun mereka meminta bantuan untuk bekerjasama terutama berkaitan dengan pelestarian budaya, maka pemerintah akan siap membantu.

Kerjasama antara pemerintah dengan Sanggar Seni Nan Gombang dalam upaya pelestarian budaya terutama pada pelaksanaan Festival Langkisau pada dasarnya adalah motivasi. Dimana motivasi pemerintah untuk menumbuhkan kembangkan rasa memiliki budaya daerah sebagai jati diri dan kearifan local yang harus dijaga dan dilestarikan. Sanggar seni dan budaya serta masyarakatnya akan menjadi tujuan utama dalam upaya pelestarian ini karena mereka adalah pelaku seni yang nantinya akan mengajarkan bentuk seni dan budaya ke generasi berikutnya. Jadi bentuk kerjasamanya mengalir saja, berlandaskan rasa kepercayaan, karena belum memiliki system perjanjian terstruktur yang jelas tertulis mengenai aturan – aturan tertentu.

### **3. Komunikasi pemerintah dengan actor lain pada pelaksanaan Festival Langkisau**

Komunikasi memanglah sangat penting, terutama dalam urusan kerjasama, komunikasi harus tetap dijaga supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar actor yang terlibat. Dimana pemerintah harus terlibat langsung pada proses pertukaran informasi dan komunikasi mengenai kebijakan atau dalam pengambilan suatu keputusan.

Komunikasi pemerintah dengan actor lain pada pelaksanaan kegiatan Festival Langkisau ini adalah pemerintah mengirimkan undangan melalui surat yang ditujukan ketiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dari orang kecamatan mengirimkan kelompok masyarakat sebagai perwakilan yang akan membawakan kebudayaan khas dari kecamatannya sendiri pada kegiatan Festival ini.

Dengan sanggar sendiri, bentuk komunikasi pemerintah terlebih dahulu mendata sanggar – sanggar yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu pemerintah nanti menentukan sanggar mana yang akan diikutsertakan pada kegiatan Festival ini, biasanya pemerintah melihat dari kelengkapan dan performa sebuah sanggar. Karena di Kabupaten Pesisir Selatan Sanggar yang sudah terkenal dan menjadi nomor satu di Kabupaten ini adalah Sanggar Nan Gombang, maka pemerintah sering memilih sanggar ini untuk diikutsertakan pada kegiatan festival dan acara kebudayaan lainnya. Setelah itu pemerintah akan mengirimkan undangan kepada sanggar yang terpilih. Lalu pemerintah akan melakukan pembinaan kepada sanggar yang terpilih sampai kegiatan Festival Langkisau terlaksana.

Lebih dalam lagi pemerintah mengadakan musyawarah berkala mengenai proses pelaksanaan kegiatan Festival ini dengan wakil dari masing – masing kecamatan dan juga sanggar seni nan gombang, yang bertujuan agar terciptanya sebuah kesepakatan mengenai konsep serta rancangan acara pada kegiatan Festival ini, karena disini pemerintah juga membuka ruang bagi segala actor terkait untuk menyampaikan ide serta gagasan demi terlaksananya kegiatan Festival ini. Jadi mengenai komunikasi antar actor yang terlibat bisa dibilang sudah sangat baik, karena dari pemerintah sendiri memiliki alur yang jelas dalam proses komunikasi untuk memulai kerjasama pada kegiatan Festival ini.

#### **4. Bentuk kepercayaan pemerintah dengan actor lain dalam pelaksanaan Festival Langkisau**

Bentuk kepercayaan disini bermakna dalam suatu proses hubungan kerjasama haruslah didasari oleh perasaan yakin dan percaya bahwa actor lain yang diajak bekerjasama mampu melakukan sesuatu, sesuai yang diharapkan bersama, serta akan selalu bertindak mengacu pada pola yang telah ditentukan secara bersama.

Dalam sebuah hubungan kerjasama rasa kepercayaan merupakan salah satu hal yang sangat krusial. Begitu juga pada pelaksanaan kegiatan Festival Langkisau ini, pemerintah seratus persen yakin dan sangat percaya bahwa masyarakat akan mampu melaksanakan kegiatan festival ini dengan baik dan sesuai harapan. Hal ini didasarkan karena kegiatan festival ini merupakan karnaval yang bertemakan representatif kebudayaan daerah, jadi yang sangat paham dan mengetahui akan kebudayaan tersebut tentu masyarakat itu sendiri, maka dari itu pemerintah sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat akan mampu menjalankan kegiatan ini dengan baik.

Terkait bentuk kepercayaan dengan Sanggar Nan Gombang, pemerintah sangat percaya bahwa Sanggar ini akan mampu membawakan penampilan yang sangat luar biasa, melihat dari track record yang dimiliki oleh sanggar ini, dan dengan jam terbang sanggar yang sudah bias dibidang sampai ke kanvas internasional, jadi tidak ada alasan untuk tidak mempercayakan kemeriahan kegiatan festival ini kepada Sanggar Nan Gombang.

Tidak hanya itu, untuk memaksimalkan performa sanggar ini di kegiatan festival nanti, pemerintah juga sering memantau proses latihan sanggar ini menjelang hari dilaksanakan festival, jadi pemerintah disini juga tau sejauh mana kesiapan sanggar untuk menghadapi festival ini. Jadi mengenai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap actor lain yang terlibat bisa dibilang sudah saling percaya, mengingat dari potensi yang dimiliki oleh actor – actor yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan Festival ini.

#### **5. Sharing/berbagi, proses membangun sikap saling memahami antar actor pada pelaksanaan Festival Langkisau**

Mengenai proses untuk membangun rasa saling memahami antar actor pada pelaksanaan kegiatan festival ini pemerintah selalu rutin mengadakan musyawarah menjelang kegiatan ini terlaksana, pada musyawarah ini semua actor yang terlibat itu diikuti sertakan mulai dari masyarakat dan juga sanggar, untuk meminimalisir terjadinya miss komunikasi antar actor. Musyawarah ini dimanfaatkan oleh masing – masing actor juga menyampaikan kemajuan serta kendala yang mereka alami, agar actor lain yang terlibat juga memahami perjuangan yang dialami rekan kerjasamanya.

Pada musyawarah ini juga biasanya dibahas apa saja kira – kira yang menjadi kelemahan di pihak lain, dan nanti akan di diskusikan lagi secara bersama bagaimana langkah kedepannya untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada masing – masing actor. Jadi pada kegiatan musyawarah ini rasa saling memahami, menghargai serta menghormati para actor yang terlibat akan semakin meningkat, sehingga pada pelaksanaan festival ini tidak ada nantinya yang akan merasa kelebihan tenaga dan lain sebagainya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip collaborative governance dalam upaya pelestarian budaya daerah melalui kegiatan festival langkisau di kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan :

1. Pada dimensi partisipasi antara pemerintah daerah, dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, sanggar seni nan gombang dan juga masyarakat kabupaten pesisir selatan dalam upaya pelestarian budaya daerah sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan masing – masing actormampu melakukan tugas sesuai peran yang dimiliki.
2. Pada dimensi akseptasi, meskipun dalam hubungan kerjasama antara dinas pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten pesisir selatan, sanggar seni nan gombang serta masyarakat belum memiliki tanda bukti kerjasama atau MoU, akan tetapi kolaborasi yang terjadi sudah sangat cukup baik dan membuat actor yang terlibat juga yakin bahwa

ini merupakan sebuah kegiatan yang memang benar – benar harus dilakukan secara bersama – sama, karena berkaitan dengan identitas daerah.

3. Pada dimensi komunikasi, proses komunikasi antara dinas pariwisata pemuda dan olahraga dengan sanggar seni nan gombang serta masyarakat yang terlibat bisa dikatakan sudah cukup baik, karena memiliki alur komunikasi yang jelas pada proses pelaksanaan kegiatan festival ini.

4. Pada dimensi kepercayaan sudah memiliki rasa saling percaya, karena masing – masing pihak yaitu dinas pariwisata pemuda dan olahraga, sanggar seni nan gombang serta masyarakat memiliki kompetensi tersendiri dan juga sudah mampu melakukan tugas sesuai perannya masing – masing, sehingga alasan untuk saling meragukan jadi berkurang.

5. Pada dimensi berbagi, antara dinas pariwisata pemuda dan olahraga dengan sanggar seni nan gombang dan juga masyarakat kabupaten pesisir selatan juga sudah saling memahami karena masing – masing actor juga terbuka untuk menerima saran dari rekan kerjasamanya dan juga kegiatan musyawarah dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan rasa saling pengertian antar aktor.

### DAFTAR PUSTAKA

- A, Chaedar. Alwasilah. (2006). Pokoknya Sunda. Bandung: Karawitan
- A. Foss, Stephen W. Littlejohn dan Karen. 2009. *Theoris of Human Communication*. Terjemahan oleh Mohammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika.
- A. Yoeti, Oka. 2005. *Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Ahmar dan Kurniawan, 2007. *Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Pemenuhan Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal MAKSI. Vol. 7. Hal.17-18
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dian Tarakanita, P. a. (2017). *Peran Komunitas Pojok Budaya dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Melalui*

- Cultural Tourism di Bantul. *Jurnal Penelitian Humaniora* , 45-56.
- Rosyida, Sri Yuliani, Gusti Putri. 2017. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2*, 2017 hlm 33-47
- Hennida, C., Felayati, R A., Wijayanti, S.H., dan Perdana, A. R. (2017). Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan China. *Global & Strategis*, 10(2), 248-263.
- Hermawan, B. (2016). Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. *Jurusan Ilmu Administrasi. FISIP. Universitas Jember*
- I Gede Pitana, Bali Post, Edisi Minggu 21 Desember 2003
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik* , 1-12. *Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: CV. Mitra Sari.
- Kurniadi, 2020, Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muhammad Ali, A. Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata pada Badan Promosi Daerah. *Ulul Albab* , 6-12.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta
- Rohani, F. N. (2018). Analisis Upaya Melestarikan Nilai - Nilai Budaya Pada Masyarakat Adat Melayu di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmiah Umum Pendidikan* , 151-162.
- Dokumen lain :**  
Profil Sanggar Seni Nan Gombang  
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Pasal 2 Ayat 7 Tahun 2015  
Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan  
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pelaksanaan dan Keikutsertaan Evant Budaya dan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020  
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016